

IMPLEMENTASI INOVASI KEBIJAKAN PROGRAM (SPP) SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO

Resky Amalia. P¹; Andi Agustang²; Andi Muhammad Idhan³; Suryadi
Lambali⁴

¹Universitas Pepabri Makassar; ²Universitas Negeri Makassar; ⁴Universitas
Hasanuddin⁴

[1reskyamalia04@gmail.com](mailto:reskyamalia04@gmail.com); [2andiagust63@gmail.com](mailto:andiagust63@gmail.com);
[3amuhidkhan@unm.ac.id](mailto:amuhidkhan@unm.ac.id); [4surlam2006@yahoo.co.id](mailto:surlam2006@yahoo.co.id)

ABSTRAK

Penelitian ini adalah bermaksud untuk mengetahui bagaimana penerapan inovasi kebijakan tersebut jika dilihat dari teori inovasi implementasi yang dikemukakan oleh Toddy Steellman yaitu dari segi faktor individu yang terdiri dari Motivasi, Norma-Norma, dan Kesesuaian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis pada UPK kecamatan Tanasitolo. Hasil Penelitian terhadap inovasi kebijakan program SPP diketahui dengan menggunakan tiga faktor yaitu Motivasi, Norma-norma dan Kesesuaian. Implementasi inovasi dari faktor individu dapat dilihat dengan terjadinya peningkatan pelunasan tunggakan setelah kebijakan tersebut diterapkan, kemudian dari faktor norma-norma dapat dilihat dengan tingginya tingkat minat masyarakat terhadap program tersebut karena mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan faktor kesesuaian dapat dilihat bahwa inovasi kebijakan jika dilihat dari faktor kesesuaian masih terdapat ketidaksesuaian terhadap masyarakat terbukti dengan adanya satu keluarga yang bertanda tangan dalam surat pernyataan ahli waris meninggalkan daerah setempat tanpa sepengetahuan pihak pemerintah kecamatan Tanasitolo dan pihak UPK.

Kata Kunci: **Implementasi, Inovasi, Simpan Pinjam Perempuan**

ABSTRACT

This research is intended to determine how the application of the policy innovation when seen from the implementation of innovation theory proposed by Toddy Stell Man that is in terms of individual factors which consists of Motivation, Norms, and Compliance. the research approach used is qualitative descriptive that is to give a clear picture of the issues studied, menginterpretasikan and explain the data systematically on UPK Tanasitolo districts. Research on innovation policies SPP program known by using three factors: Motivation, Norms and Conformity. Implementation of the innovation of the individual factors can be seen by the increase in repayment arrears after the policy is implemented, then the norms of the factors can be seen by the high level of public interest in the program because it can improve people's lives. Whereas suitability factors can be seen that when viewed from the policy innovation suitability factors still there is a mismatch on the community as evidenced by the presence of one family who signed the affidavit heir left the local area without the knowledge of the government party and the UPK Tanasitolo districts.

Keywords: *Implementation, Innovation, Women's savings and loan*

PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yaitu melalui pembangunan yang bertumpu pada negara, menjadi

pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah pembangunan masyarakat (*community development*). Dalam hal ini, pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, (Makmur 2020; Sari and Soesatyo n.d.; Yusuf, Iyan, and Saputra 2011)

Wujud dari keseriusan pemerintah dalam bidang pembangunan, yaitu dengan menciptakan program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP), yang diatur berdasarkan (Kepmen Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25/Kep/Menko/kesra/VII/2007 Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir 2007) secara umum dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, dan secara umum dikelola oleh Badan Pengembangan Masyarakat (BPM).

Program Pemberdayaan ini lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas. PNPM MP yang sudah dimulai sejak tahun 2007 merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan/kelurahan, (Fadilah, Ismanto, and Stiawati 2017; LESTARI 2020; Margayaningsih 2016)

Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM (Rumah Tangga Miskin) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam PNPM MP PTO penjelasan X bahwa dana bergulir terdiri atas dua jenis yaitu program SPP dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) program tersebut mendapatkan permodalan dan menyediakan pendanaan untuk peningkatan kapasitas kelompok usaha), kegiatan peningkatan kapasitas usaha kelompok perempuan (menyediakan hibah untuk pendanaan sarana usaha dan modal kerja untuk satu siklus usaha). Dengan tujuan pelestarian dan pengembangan dana bergulir baik yang bersumber dari kegiatan SPP dan UEP yang berasal dari PPK agar sesuai dengan prinsip, tujuan dan mekanisme, (Nikmah 2017; Perizade 2011; Wahyuni 2012)

Pelaksanaan program PNPM MP SPP bertumpu pada pendekatan proses partisipatif. Keswadayaan dari kelompok masyarakat yang menjadi target program, sehingga pemerintah hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan dan membimbing. Dalam implementasinya, program ini melibatkan seluruh aspek

baik dari aspek daerah, pemerintah, pihak konsultan maupun dari segenap lapisan masyarakat yang menjadi sasaran dari program SPP, (Ekowati and Roro 2005; Fikri and Hidayah 2021; Roberts-Gray and Gray 1983)

Namun berdasarkan keputusan pemerintah mengenai pemberhentian PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) di tahun 2015 ini melalui (Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan. Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP). 2008. Jakarta: Departemen Dalam Negeri. 2008) disebutkan bahwa kontrak kerja fasilitator berakhir pada 31 Desember 2014. Meskipun secara kebijakan PNPM sudah berakhir namun program dana bergulir SPP dan UEP khususnya di Tanasitolo masih tetap berjalan dan secara otomatis program SPP dan UEP dinaungi oleh BKAD (Badan Kerja sama Antar Desa) sebagaimana dijelaskan dalam (peraturan Bupati wajo Nomor 58 tahun 2015 tentang perlindungan dan pelestarian asset dana simpan pinjam usaha ekonomi produktif (SPP-UEP) kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan/integrasi (PNPM-MP/ integrasi) kabupaten wajo 2015). BKAD merupakan sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan di satu wilayah dalam satu kecamatan melalui forum musyawarah antardesa yang susunan keanggotaanya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, selain itu BKAD merupakan badan pemegang dan pengelola tertinggi serta lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana bergulir di tingkat kecamatan melalui MAD, yang sebelumnya BKAD hanya sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pimpinan forum dan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) sebagai pemegang dan pengelola tertinggi, (LESTARI 2020; Perizade 2011; Suharto 2011)

Berdasarkan hal tersebut proses pengelolaan dana SPP dan UEP sebelum dan sesudahnya juga mengalami inovasi dalam pengimplementasiannya. Sebelum PNPM MP berakhir diterapkan aturan tanggung renteng yaitu tanggung bersama jika salah satu anggota melakukan penunggakan maka semua anggota dalam kelompok tersebut melakukan tanggung bersama, secara bersamaan juga diterapkan sanksi lokal yaitu sanksi yang dikenakan kepada desa setempat dalam hal ini jika salah satu kelompok mengalami penunggakan maka desa kelompok tersebut tidak mendapatkan dana fisik dan dana SPP. Dengan berakhirnya PNPM MP maka aturan mengenai surat pernyataan ahli waris dan jaminan BPKB, SPPT dll dibuat setelah SPP berada di bawah naungan BKAD mengingat sanksi lokal secara otomatis telah dihapus bersamaan dengan berakhirnya PNPM MP, surat pernyataan ahli waris tersebut dimaksudkan agar setiap anggota yang tergolong dalam kelompok SPP harus mempunyai jaminan seperti BPKB, SPPT dll dan wajib membuat surat pernyataan ahli waris yang ditanda tangani oleh keluarga

dekat baik suami maupun anak hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mengikat anggota anggotaSPP untuk menghindari terjadinya hal-hal yang menyebabkan proses pengimplementasian terhambat, (Kurniawan and Manar 2013; Parsons 2008; Steelman 2010).

Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah kabupaten di Sulawesi Selatan yang menjadi sasaran dari PNPM MP SPP. Berdasarkan profil Kecamatan Tanasitolo dijelaskan bahwa kecamatan ini terdiri dari 15 desa dan 4 kelurahan, dengan jumlah penduduk 38.090 jiwa atau 3177 KK. Sebanyak 47 persen KK di kecamatan ini tergolong sebagai KK miskin/ Rumah Tangga Miskin (RTM). Desa termiskin di Kecamatan ini adalah Desa Waetuwo, dengan jumlah RTM hingga 113 KK dan penghasilan rata-rata Rp 12500 per hari. Sebagian besar (70 persen) masyarakatnya berpendidikan Sekolah Dasar. Berdasarkan laporan permasalahan fasilitator SPP dan UEP bulan Agustus 2016 bahwa Masyarakat Kecamatan Tanasitolo yang menjadi sasaran program SPP (*target groups*) masih memiliki beberapa kendala di antaranya masih terbatasnya kemampuan serta keterampilan dari penduduk miskin itu sendiri, di antaranya adalah kurangnya keterampilan, pengalaman berusaha, pemilihan jenis usaha yang produktif dan seringnya terjadi penunggakan kelompok SPP diberbagai Desa. Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program SPP itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif guna mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dan tepat mengenai masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini berfokus bagaimana pengimplementasian inovasi kebijakan program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Kecamatan Tansitolo Kabupaten Wajo. Dengan Penentuan unit analisis didasarkan pada pertimbangan objektif, yang berdasarkan kepada keputusan Menteri No.25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang dipengaruhi oleh faktor individu berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Steelmen. Selain itu penelitian ini menggunakan *Key person* dengan mengetahui informasi awal tentang objek penelitian maupun informasi penelitian untuk memulai melakukan wawancara atau observasi. Dalam melakukan analisis penulis menggunakan Data Prime dan Data Sekunder, (Miles and Huberman 1994; Miles, Huberman, and Saldana 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan program SPP

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Menurut Jenkins Studi Implementasi (Parsons 2008) adalah: Adalah studi perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

Acuan pelaksanaan program Simpan pinjam perempuan di kecamatan tanasitolo mengacu kepada PTO penjelasan X PNPM MP mengenai pengelolaan dana bergulir baik sebelum maupun setelah PNPM MP berakhir. Namun setelah PNPM MP berakhir maka dikeluarkanlah (peraturan Bupati Wajo Nomor 58 tahun 2015 tentang perlindungan dan pelestarian asset dana simpan pinjam usaha ekonomi produktif (SPP-UEP) kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan/integrasi (PNPM-MP/ integrasi) kabupaten wajo 2015)kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan/integrasi (PNPM MPD/Integrasi) Kabupaten Wajo.

Dalam peraturan bupati tersebut dijelaskan bahwa status kepemilikan hasil kegiatan PNPM MP termasuk SPP adalah milik masyarakat. Di dalam Perbup tersebut juga dijelaskan bahwa dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM MP maka perlu dibentuk institusi yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat diberikan pembinaan dan pengawasan secara optimal dari pemerintah daerah. Oleh karena itu pada bulan Oktober 2015 telah diselenggarakan serah terima asset dana bergulir dari tim penetaan ke BKAD dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat desa serta unsur lain yang terakait dengan pelaksanaan PNPM MP. Maka SPP dan UEP secara resmi dinaungi oleh BKAD.

Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh *policy maker* atau para pembuat kebijakan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri dalam hal pengimplementasian inovasi kebijakan program SPP yang telah dikeluarkan

BKAD yang merupakan lembaga tertinggi dalam pengelolaan dana bergulir. (Kim and Chung 2017; Roberts-Gray and Gray 1983; Wandersman, Chien, and Katz 2012).

Kebijakan surat pernyataan ahli waris memiliki peranan yang sangat besar agar mampu menekan penunggakan jika dibandingkan dengan surat jaminan. Meskipun pada dasarnya surat jaminan juga merupakan salah satu bukti kuat untuk mengikat atau “mengancam” anggota SPP. Namun belum ada kasus yang pernah teralisasi. Seringnya terjadi *Urbanisasi* pada masyarakat daerah setempat sehingga menjadi alasan akan pentingnya peran surat pernyataan ahli waris bagi anggota SPP (Ekowati and Roro 2005; Parsons 2008)

Kedudukan UPK di kecamatan Tanasitolo merupakan sebuah organisasi yang dibentuk pada saat PNPM masih berjalan untuk menaungi kegiatan dana bergulir termasuk Program Simpan Pinjam Perempuan yang terdiriatas 58 kelompok dari 11 Desa yang melaksanakan program SPP. Berikut nama-nama kelompok yang tergolong dalam kelompok SPP:

Tabel. I.1. Jumlah Kelompok SPP

| No | Desa | JumlahKelompok |
|-----|---------------|--------------------|
| 1. | Tonrilippue | 1 |
| 2. | Mappadaelo | 3 |
| 3. | Ujunge | 2 |
| 4. | BaruTancung | 7 |
| 5. | Pajalele | 2 |
| 6. | Ujung Baru | 7 |
| 7. | Mario | 5 |
| 8. | Assorajang | 9 |
| 9. | Tancung | 13 |
| 10. | Wewengrewu | 6 |
| 11. | Pincengpute | 3 |
| | Jumlah | 58 Kelompok |

Sumber: UPK Kecamatan Tanasitolo

Meskipun secara kebijakan PNPM sudah berakhir namun program dana bergulir termasuk SPP dan UEP masih tetap berjalan termasuk 58 kelompok yang telah disebutkan di atas.

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri adalah kegiatan pemberian dana bantuan permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan umum kegiatan kelompok SPP ini ialah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan,

kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan dasar, dan memperkuat kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan rumah tangga miskin. Sedangkan tujuan khususnya antara lain adalah memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi keluarga/rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha, (LESTARI 2020; Perizade 2011)

Ada tiga jenis usaha yang dikembangkan oleh masyarakat Tanasitolo terkhusus anggota SPP yaitu menenun, menjual campuran dan memsarkan hasil tenunnya (jual kain sutra). Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan UPK yang dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel IV.2 .Jenis Usaha SPP

| Nama Kelompok | Desa | Jenis Usaha |
|----------------------|--------------|-------------------------|
| Cempaka | Ujunge | Campuran |
| Cempaka V | Ujunge | Jual Pakaian |
| Sejahtra | Ujung Baru | Jual baju |
| Seruni 1 | Pinceng Pute | Tenun, dan campuran |
| Seruni | Assorajang | TBM (Tenun Bukan Mesin) |

Sumber UPK Kecamatan Tanasitolo

Pelaksanaan SPP dilaksanakan diberbagai kecamatan yang ada di Indonesia termasuk di Kecamatan Tanasitolo. Kecamatan Tanasitolo merupakan salah satu dari 3 kecamatan terbaik dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo dan salah satu kecamatan yang sukses dalam pelaksanaan program simpan pinjam perempuan, (Parsons 2008; Steelman 2010)

Pelaksanaan program SPP di Kecamatan Tanasitolo memiliki cara tersendiri untuk menarik minat masyarakat setempat salah satunya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ketua UPK di atas bahwa Kecamatan Tanasitolo menerapkan sistem bunga yang tidak terlalu tinggi yaitu hanya 2% menurun selama satu tahun dalam artian selama satu tahun, dana pinjaman mengalami penurunan bunga sebanyak 2% setiap bulannya. Misalnya jumlah tagihan pada bulan Januari sebanyak Rp.120.000 maka bulan selanjutnya mengalami penurunan sebanyak 2% jadi jumlah tagihan yang harus dibayar pada bulan februari sebanyak Rp.118.000. Selain memiliki sistem tersendiri untuk menarik minat masyarakatnya Tanasitolo dijuluki sebagai pusat persuteraan yang ada di Kabupaten Wajo sehingga sering dikunjungi oleh bank dunia, (Parsons 2008; Steelman 2010)

Penelitian ini, membahas mengenai implementasi inovasi Kebijakan Program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Dalam jurnal ilagaligo (Makmur 2020) mengemukakan bahwa keberhasilan inovasi sangat ditentukan oleh kreativitas manusia, bagi manusia

yang tidak kreatif maka inovasi pun sulit dikembangkan kemudian kebutuhan dan keinginan tidak mungkin dapat diwujudkan.

Dalam upaya menjawab permasalahan implementasi Inovasi kebijakan program SPP di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Maka teori dari Steelman yang dianggap mendekati permasalahan tersebut. Menurut Steelman ada tiga variabel yang berpengaruh dalam pengimplementasian inovasi, yakni bahwa keberhasilan implementasi inovasi dalam suatu kebijakan program dapat diukur melalui tiga faktor, (Parsons 2008; Steelman 2010)

1. Faktor Individu

Faktor individu meliputi: (1) motivasi, (2) norma-norma, dan (3) harmoni, serta kesesuaian Individu yang termotivasi dan bekerja dalam norma-norma sosial di tempat kerja dan lembaga yang dominan atau budaya organisasi yang mendukung inovasi atau praktek inovatif.

2. Faktor Struktur

Faktor struktur terdiri atas (1) aturan dan komunikasi (2) insentif (3) keterbukaan, dan (4) keseimbangan Struktur yang memfasilitasi aturan yang jelas dan komunikasi, insentif yang mendorong kepatuhan terhadap praktek inovatif, lingkungan politik yang terbuka untuk inovasi, dan kesadaran perlawanan dan langkah-langkah untuk mengatasi, mengurangi, atau menetralkan perlawanan dan)

3. Faktor Budaya

Faktor budaya terdiri atas (1) Guncangan, (2) pengelompokan, dan (3) pengakuan. Strategi untuk membingkai masalah untuk mendukung praktek inovatif, memanfaatkan guncangan atau fokus peristiwa jika terjadi, dan penggunaan inovasi untuk meningkatkan legitimasi).

Berdasarkan ketiga faktor implementasi inovasi yang dikemukakan oleh Steelman kaitannya dengan penelitian ini, mengabaikan faktor struktur dan faktor budaya dikarenakan dalam penelitian implementasi inovasi kebijakan program simpan pinjam perempuan lebih cenderung berkaitan dengan faktor individu yaitu dengan melihat sejauh mana motivasi anggota kelompok SPP sehingga dapat menjalankan inovasi kebijakan tersebut, sedangkan untuk melihat sejauh mana keharmonisan kerja anggota SPP dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat terhadap inovasi tersebut maka melakukan pendekatan faktor norma dan harmoni. Untuk melihat kesesuaian dan keselarasan nilai-nilai individu dan nilai-nilai lembaga dengan inovasi kebijakan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan faktor kesesuaian dan keselarasan.

Implementasi Inovasi Kebijakan Program Simpan Pinjam

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di awal maka menjadi sebuah permasalahan tersendiri untuk diteliti, pada pendiskripsian ini akan dilakukan telaah mendalam mengenai inovasi kebijakan tersebut dan melihat bagaimana penerapan inovasi kebijakan tersebut. Meskipun telah dikeluarkan inovasi tersebut masih saja terjadi penunggakan, dimana penunggakan merupakan masalah terbesar yang terjadi di organisasi UPK ini, baik sebelum maupun sesudah PNPM MP berakhir.

Adapun Faktor yang mempengaruhi Implementasi Inovasi Kebijakan Program Simpan Pinjam Perempaun di Kecamatan Tanasitolo yakni sebagai berikut:

Faktor Individu

Berdasarkan penjelasan Steelman mengenai faktor Individu "*Individuals who are motivated and working within workplace social norms and the dominant agency or organizational culture that supports the innovation or the innovative practice*"

Adapun poin-poin yang berasal dari faktor individu meliputi: (1) motivasi, (2) norma-norma, dan (3) harmoni, serta kesesuaian.

Motivasi

Motivasi merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana motivasi individu terhadap inovasi kebijakan yang dibuat. Teori motivasi dalam faktor individu menyatakan bahwa setiap aktor akan termotivasi untuk melakukan perubahan. Peningkatan motivasi sangat dipengaruhi oleh aspek kebijakan yang dilakukan dan hal ini mendorong pada peningkatan kemampuan dari masyarakat yang bersangkutan terutama dalam melaksanakan tugas-tugas mereka (Kim and Chung 2017). Sejalan dengan pandangan (Anderson 2014) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan dalam organisasi serta menjadi pedoman dan pendorong dalam meningkatkan kapasitas personil dalam organisasi tersebut

Motivasi merupakan stimulus yang mendorong individu-individu yang merasa kurang puas dengan merancang solusi alternatif. Dengan memilih pilihan rasional dari gambaran teori kelembagaan dan kebijakan dan teori manajemen, motivasi memperhitungkan apa yang mendorong kebijakan pengusaha atau pemimpin untuk melakukan suatu perubahan. Teori motivasi dalam faktor individu menyatakan bahwa setiap aktor akan termotivasi untuk melakukan perubahan. Demikian juga, orang-orang yang paham akan teori tersebut mereka akan mampu merancang alternatif solusi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka harus memiliki beberapa tingkat kewenangan untuk melakukan perubahan, (Parsons 2008; Steelman 2010).

Untuk motivasi individu terhadap inovasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kecamatan Tanasitolo dalam hal ini oleh BKAD yang merupakan lembaga tertinggi pengelola tertinggi dana SPP. Sejalan dengan hal tersebut dengan adanya inovasi kebijakan ini tentunya memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang tergolong dalam kelompok SPP yaitu meningkatkan potensi dan kemampuan perempuan RTM dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Implementasi kegiatan SPP-PNPM Mandiri juga memberikan dampak positif terhadap kemajuan perekonomian di desa terutama terhadap berkembangnya kegiatan simpan pinjam. Selain meningkatkan kepedulian masyarakat untuk membayar tunggakan di sisi lain juga mengalami peningkatan pembayaran tunggakan maka setelah beberapa bulan pelaksana aninovasi kebijakan ini diterapkan terdapat peningkatan pembayaran tunggakan, (Parsons 2008; Steelman 2010)

Dengan adanya inovasi kebijakan ini mampu menekan penunggakan meskipun tidak mampu mengurangi penunggakan secara drastis. Namun di sisi lain masih adanya ketidaksesuain antara kebijakan tersebut dan anggota kelompok SPP yang lain sehingga tidak semua anggota mampu termotivasi dengan adanya inovasi kebijakan ini. Adapun alasan mengapa anggota kelompok SPP termotivasi dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut yaitu guna meningkatkan motivasi masyarakat setempat. Terlaksananya inovasi kebijakan SPP tentu tidak lepas dari peran kepala desa.

Pelaksanaan program SPP dan pelaksanaan inovasi kebijakan yang dikeluarkan tidak lepas dari peran pemerintah untuk membantu pihak UPK untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam hal ini masalah penunggakan, meskipun pada dasarnya peran kepala desa sebelum maupun sesudah PNPM MP berakhir tetap memiliki peran yang samayaitu mengontrol jalannya program SPP.

Di sisi lain ketika kita berbicara masalah individu bahwa setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda begitu pun halnya dengan ketika kita membahas mengenai motivasi membayar tidak serta merta semua pengguna program mampu termotivasi dengan kehadiran aturan tersebut. Oleh karenanya di situlah pihak organisasi atau pihak UPK yang berperan penting dalam pelaksanaan program dengan secara perlahan menyadarkan masyarakat akan pentingnya sebuah aturan, (Parsons 2008; Steelman 2010)

Dalam kaitannya dengan implementasi Inovasi Kebijakan Program SPP di Kecamatan Tanasitolo, faktor motivasi sangat berperan dalam keberlangsungan inovasi tersebut baik pihak pemerintahnya maupun pihak target grup kelompok SPP. Pihak pemerintah dalam hal ini pihak BKAD yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan dana bergulir SPP dan UEP mengeluarkan sebuah

Inovasi dengan maksud untuk mengurangi tunggakan dan meningkatkan motivasi kepada anggota kelompok untuk melunasi setiap tunggakan yang ada.

Namun sebelum inovasi kebijakan tersebut dikeluarkan terdapat sistem atau cara diterapkan guna mengatasi terjadinya penunggakan kepada anggota SPP adapun sistem yang dimaksud sebagaimana telah dijelaskan pada hasil penelitian di atas bahwa diterapkan sistem sanksi Lokal yaitu sanksi yang diberikan kepada pihak desa setempat dengan tidak diberikannya dana fisik jika terdapat salah satu anggota SPP melakukan penunggakan yang merupakan masyarakat dari desa tersebut. Dengan berakhirnya PNPM MP maka sanksi lokal secara bersamaan juga telah berakhir namun pihak BKAD memberikan solusi alternatif guna mengatasi terjadinya penunggakan dengan dikeluarkannya aturan mengenai surat pernyataan ahli waris dan surat jaminan, (Steelman 2010).

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi inovasi tersebut dianggap berhasil jika dilihat dari segi motivasi individu yang tergolong dalam kelompok SPP terbukti dengan terjadinya penurunan jumlah tunggakan setelah inovasi tersebut diimplementasikan. Selain itu meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergolong dalam kelompok SPP merupakan salah satu faktor keberhasilan program SPP ini, (Steelman 2010).

Dalam perubahan kebijakan termasuk inovasi kebijakan sistem kepercayaan sangat berpengaruh dalam suatu perubahan. Jika dikaitkan dengan inovasi kebijakan program SPP di Kecamatan Tanasitolo, jika masyarakat yang tergolong dalam kelompok SPP tersebut memiliki kepercayaan yang kuat akan inovasi tersebut maka masyarakat yang terlibat langsung akan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankan inovasi tersebut.

Norma dan Harmoni

Norma dan harmoni adalah kerja para aktor untuk predisposisi terhadap perubahan untuk melestarikan norma-norma sosial dan keharmonisan, norma dan harmoni ini juga memperhitungkan keinginan individu untuk menjalin hubungan kerja yang baik. Teori implementasi bottom-up dan institusionalisme sosiologis mengatakan bahwa jika norma kerja secara konsisten dengan implementasi inovasi, maka keharmonisan kerja akan bertahan, sehingga lebih mudah setiap individu untuk bekerja sama dengan melakukan praktek inovatif. Jika inovasi tidak konsisten dengan norma-norma kerja, maka individu yang ingin mengejar praktek inovatif kemungkinan akan mengalami ketidakharmonisan dengan teman kerja lainnya.

Dalam konteks membandingkan antara mentalitas barat dan timur, Soetoprawiro mengemukakan mengenai harmoni yang menjadi faktor paling penting di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dimana dikatakannya bahwa segala sesuatu yang baik dapat diterjemahkan ke dalam istilah harmoni. Segala

sesuatu hendaknya senantiasa serasi, selaras dan seimbang. Yang adil dan yang makmur adalah yang harmonis. Segala perilaku dan tindak tanduk itu berangkat dari situasi yang harmonis menuju ke situasi yang harmonis baru, (Fadilah et al. 2017; Yusuf et al. 2011).

Makna dari harmonisasi adalah sebagai upaya maupun dalam arti sebagai proses, diartikan sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal yang bertentangan, dan kejanggalan, kecocokan dan keselarasan antara berbagai faktor yang sedememikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari suatu sistem, (Perizade 2011).

Sebuah pelaksanaan inovasi (Implementing Innovation) dapat dikatakan berhasil jika salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi terpenuhi termasuk faktor norma dan harmoni di dalamnya berkaitan dengan implementasi inovasi kebijakan program SPP, (Steelman 2010).

Berkaitan dengan penelitian Implementasi Inovasi kebijakan program SPP di Kecamatan Tanasitolo, bahwa dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat setempat setelah diimplementasikan inovasi tersebut membuktikan bahwa nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat tidak bertentangan dengan inovasi yang telah dikeluarkan sehingga akan memberikan keharmonisan terhadap masyarakat yang telah bergabung dalam kelompok SPP.

Berbicara tentang norma membahas mengenai kesepahaman aturan, kesepakatan, kebiasaan yang baik. Norma dan harmoni adalah kerja para aktor untuk predisposisi terhadap perubahan untuk melestarikan norma-norma sosial dan keharmonisan, norma dan harmoni ini juga memperhitungkan keinginan individu untuk menjalin hubungan kerja yang baik. Teori implementasi bottom-up dan institusionalisme sosiologis mengatakan bahwa jika norma kerja secara konsisten dengan implementasi inovasi, maka keharmonisan kerja akan bertahan, sehingga lebih mudah setiap individu untuk bekerja sama dengan melakukan praktek inovatif. Jika inovasi tidak konsisten dengan norma-norma kerja, maka individu yang ingin mengejar praktek inovatif kemungkinan akan mengalami ketidakharmonisan dengan teman kerja lainnya, (Steelman 2010).

Sejalan dengan itu inovasi kebijakan terhadap program SPP yang telah dikeluarkan oleh Badan Kerja Sama Antar Desa yaitu mengenai kebijakan surat ahli waris dan jaminan BPKB, SPPT, Rumah dll dapat dikatakan sesuai dengan norma masyarakat Kecamatan Tanasitolo hal tersebut dipertegas dengan apa yang telah dikemukakan oleh salah satu masyarakat Kecamatan Tanasitolo dan salah satu anggota kelompok simpan pinjam perempuan kelompok Masagena desa Pajalele.

Dengan adanya inovasi kebijakan tersebut akan memotivasi anggota kelompok yang tergolong dalam kelompok SPP tanpa menyalahi norma atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat bahkan berdasarkan pandangan di atas inovasi yang dikeluarkan memiliki nilai positif yang lebih jauh dibandingkan dengan sistem yang telah diterapkan sebelumnya dalam hal ini sistem sanksi lokal untuk memberikan informasi kepada anggota SPP dengan hadirnya inovasi tersebut maka UPK telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan maksud memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga inovasi yang akan diterapkan akan dikenal, dihayati, dan dipahami oleh masyarakat dan kedepannya tidak terdapat hal-hal yang nantinya bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat karena pada dasarnya Sebuah inovasi tidak dapat diimplementasikan dengan baik apabila belum diketahui oleh masyarakat luas. Untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai inovasi yang akan diimplementasikan, terlebih dahulu harus diadakan sosialisasi sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh pihak UPK, (Steelman 2010).

Kesesuaian dan keselarasan

Kesesuaian mengisyaratkan bahwa nilai-nilai individu dalam budaya organisasi. Jika nilai-nilai individu tidak sesuai atau tidak selaras dengan nilai-nilai lembaga (budaya organisasi), maka sulit bagi individu tersebut untuk melakukan praktek inovasi, (Steelman 2010). Berkaitan dengan penelitian implementasi kebijakan program Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Tanasitolo jika dilihat dari faktor kesesuaian dan keselarasan menurut Steelman masih terdapat ketidaksesuaian dengan sebagian individu yang tergolong dalam kelompok SPP tersebut, terbukti pada saat penelitian masih adanya ketua kelompok yang meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ketua kelompok dan tanggung jawabkan tunggakan yang ada di UPK dalam kasus tersebut terdapat anggota kelompok SPP yang meninggalkan daerah tanpa sepengetahuan UPK. Pada dasarnya nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat khususnya masyarakat Tanasitolo memiliki nilai-nilai berbeda-beda sehingga masih ditemukannya ketidaksesuaian antara inovasi tersebut dengan masyarakat setempat, (Roberts-Gray and Gray 1983; Suharto 2011).

Sejalan dengan implementasi inovasi kebijakan program simpan pinjam perempuan di Kecamatan Tanasitolo sebagian masyarakat yang sadar akan pentingnya suatu perubahan akan mendukung inovasi tersebut namun di sisi lain sebagian yang belum sadar akan pentingnya suatu perubahan yang lebih baik sebagian orang itulah yang menyebabkan terjadi ketidaksesuaian dalam individu masyarakat. Di samping itu peran pemerintah sangat penting untuk memberikan keyakinan kepada sebagian masyarakat yang menyebabkan munculnya

ketidaksesuaian tersebut dalam hal ini pemerintah Kecamatan Tanasitolo dan pihak UPK yang merupakan penanggung jawab dalam pengelolaan dana bergulir.

Selain ketiga faktor yang dijelaskan di atas yaitu faktor motivasi, norma-norma/harmoni dan kesesuaian, Implementasi Inovasi kebijakan program Simpan pinjam Perempuan di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten juga berkaitan dengan faktor struktur sebagaimana yang telah dikemukakan dalam teori Steelman mengenai faktor struktur, (Steelman 2010).

Kesesuaian atau keselarasan antara nilai dominan dalam sebuah pemerintahan dengan yang lebih rendah akan mempengaruhi dukungan individu atas inovasi yang diberikan selain itu kesesuaian mengisyaratkan bahwa nilai-nilai individu dalam budaya organisasi. Jika nilai-nilai individu tidak sesuai atau tidak selaras dengan nilai-nilai lembaga (budaya organisasi), maka sulit bagi individu tersebut untuk melakukan praktek inovasi.

Membahas mengenai sanksi lokal dan surat pernyataan, surat pernyataan lebih meringankan daripada sanksi lokal hal tersebut juga dikemukakan oleh salah satu kepala desa yang tidak setuju dengan sanksi lokal sehingga kelompok SPP tidak terdapat di Desa Lowa, namun setelah aturan surat pernyataan ahli waris dan pemberian jaminan maka beliau kembali tertarik untuk bergabung dalam Program SPP ini. Inovasi kebijakan yang dikeluarkan oleh BKAD setelah PNPM MP berakhir memiliki banyak dukungan dari berbagai pihak termasuk kepala desa Lowa di atas.

Meningkatnya pembayaran pelunasan tunggakan selama inovasi kebijakan tersebut diimplementasikan menutup kemungkinan keberhasilan inovasi tersebut namun bila program tersebut terdapat ketidaksesuaian dalam pengimplementasiannya maka akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak yang terlibat terbukti dengan adanya kasus seperti kasus Zalsabilah dan Al-Asri di atas. Ketidaksesuaian dalam suatu program akan mengakibatkan kerugian secara sosial dan ekonomi bahkan akan berpotensi merusak reputasi salah satu pihak baik pihak organisasi yang terlibat atau masyarakat yang terlibat dan akan mengganggu keberlanjutan program tersebut. Unsur penting untuk menilai sebuah kelayakan program yaitu dengan melihat kesesuaiannya, (LESTARI 2020; Nikmah 2017).

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian, hanya terdapat tiga kelompok yang memiliki tunggakan yang masuk dalam kategori kolektibilitas IV dan V yaitu kelompok Zalsabilah I, Zalsabilah II dan Al-asri. Kelompok yang tergolong dalam Kolektibilitas IV merupakan angsuran pokok menunggak sebanyak 5 sampai 6 kali sedangkan kategori kolektibilitas V merupakan angsuran pokok menunggak di atas 6 kali angsuran. Kelompok yang tergolong dalam kolektibilitas IV dan V merupakan penunggakan yang paling bermasalah

sebagaimana yang telah disajikan dalam data di atas bahwa kelompok Zalsabilah I,II dan Al-asri masuk ke dalam kategori Kolektibilitas IV dan V sehingga hal tersebut yang mendasari jika kelompok tersebut mengalami masalah penunggakan yang besar, lain halnya dengan kelompok yang tergolong dalam kolektibilitas 1 yaitu angsuran pokok lancar tanpa tunggakan sedangkan kolektibilitas 2 masih dianggap sebagai tunggakan berjalan karena angsuran pokok menunggak 1 sampai 2 kali penunggakan sehingga penunggakan kolektibilitas 1 dan 2 tidak dianggap sebagai kelompok yang bermasalah karena penunggakan hanya terlambat beberapa hari, (Ekowati and Roro 2005; Parsons 2008).

Faktor penyebab terjadinya tunggakan pada intinya terdapat pada bagaimana kerjasama antara anggota kelompok dan kelompok SPP. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa terjadinya penunggakan disebabkan oleh ketua kelompok yang tidak mengembalikan tunggakan anggota ke UPK dan faktor penyebab terjadinya tunggakan yang disebabkan oleh anggota kelompok yaitu tidak lancarnya usaha yang dijalankan dan seringnya terjadi urbanisasi yang dilakukan oleh anggota kelompok, (Steelman 2010).

KESIMPULAN

Dengan melihat hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengimplementasian inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan di Kecamatan Tanasitolo sudah memberikan dampak yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan kebijakan yang telah diterapkan oleh UPK dan pihak pemerintah Kecamatan Tanasitolo yang mampu mengubah motivasi masyarakat dalam hal ini anggota kelompok SPP untuk melunasi tunggakan terbukti pada saat aturan surat pernyataan ahli waris dan pemberian jaminan diterapkan mengalami penurunan tunggakan yang pesat.

Namun, dibalik keberhasilan program yang dilaksanakan oleh UPK Kecamatan Tansitolo juga terdapat kekurangan misalnya masih adanya ketidaksesuaian antara kebijakan tersebut dan anggota kelompok SPP. Untuk langkah selanjutnya dari pelaksanaan kebijakan surat pernyataan ahli waris dan pemberian jaminan pihak UPK agar lebih diperketat lagi termasuk di dalamnya pemberian jaminan anggota untuk mengurangi terjadinya penunggakan Serta Pihak UPK sebaiknya merancang solusi alternative jika dalam satu anggota keluarga dalam hal ini pihak yang bertandatangan di surat pernyataan ahli waris meninggalkan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, James E. 2014. *Public Policymaking*. Cengage Learning.

Ekowati, Mas Roro Lilik, and Mas Roro. 2005. "Perencanaan, Implementasi Dan

Evaluasi Kebijakan Atau Program.” *Surakarta: Pustaka Cakra.*

Fadilah, Ulfah, Gandung Ismanto, and Titi Stiawati. 2017. “IMPLEMENTASI PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GERAKAN PEMBANGUNAN UNTUK MASYARAKAT (PDPM GERBANG UTAMA) DI KECAMATAN BAROS.”

Fikri, Hilman Azka, and Aini Hidayah. 2021. “UPAYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA PADANG LUAR NGARI III KOTO KECAMATAN RAMBATAN.” *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1(2).

Kepmen Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25/Kep/Menko/kesra/VII/2007 Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir. 2007. *Kepmen Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir.*

Kim, Jung Su, and Goo Hyeok Chung. 2017. “Implementing Innovations within Organizations: A Systematic Review and Research Agenda.” *Innovation* 19(3):372–99.

Kurniawan, Daniel Teguh, and D. Ghulam Manar. 2013. “Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Studi Kasus Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (Pnppmpd) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.” *Journal of Politic and Government Studies* 149–60.

LESTARI, EVANIA. 2020. “EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi UPK Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).”

Makmur, Ardyansyah. 2020. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG.” *Journal I La Galigo/ Public Administration Journal* 3(2):32–39.

Margayaningsih, Dwi Iriani. 2016. “Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan.” *Jurnal PUBLICIANA* 9(1):158–90.

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook.* sage.

- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2014. "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook."
- Nikmah, Siti Faiqotun. 2017. "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2015."
- Parsons, Wayne. 2008. "Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah)." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*
- peraturan Bupati wajo Nomor 58 tahun 2015 tentang perlindungan dan pelestarian asset dana simpan pinjam usaha ekonomi produktif (SPP-UEP) kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan/integrasi (PNPM-MP/ integrasi) kabupaten wajo. 2015. *Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Asset Dana Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Produktif (SPP-UEP) Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan/Integrasi (PNPM-MP/ Integrasi) Kabupaten Wajo.*
- Perizade, Badia. 2011. "TIM KAJIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN."
- Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan. Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP). 2008. Jakarta: Departemen Dalam Negeri. 2008. *Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan. Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP). 2008. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.*
- Roberts-Gray, Cynthia, and Thomas Gray. 1983. "Implementing Innovations: A Model to Bridge the Gap between Diffusion and Utilization." *Knowledge* 5(2):213–32.
- Sari, Intan Setya Gita Risiya, and Yoyok Soesatyo. n.d. "Peran Dan Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto."
- Steelman, Toddi A. 2010. *Implementing Innovation: Fostering Enduring Change in Environmental and Natural Resource Governance.* Georgetown University Press.
- Suharto, Edi. 2011. "Kebijakan Sosial." *Bandung: Alfabeta.*
- Wahyuni, Sri. 2012. "Implementasi Pemberian Bantuan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Di Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Tahun 2011.”

Wandersman, Abraham, Victoria H. Chien, and Jason Katz. 2012. “Toward an Evidence-Based System for Innovation Support for Implementing Innovations with Quality: Tools, Training, Technical Assistance, and Quality Assurance/Quality Improvement.” *American Journal of Community Psychology* 50(3–4):445–59.

Yusuf, Yusbar, Rita Yani Iyan, and Edwin Saputra. 2011. “Implikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Dikecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Tahun 2007-2010.” *Jurnal Ekonomi* 19(02).